

ABSTRAK
KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS
TANAH TERHADAP PROGRAM PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)
Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang

Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata ruang memiliki tujuan untuk memberikan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum kepada masyarakat yang memiliki Hak atas tanah, dengan cara melakukan Pendaftaran tanah terhadap tanah masyarakat, dalam rangka mempercepat pendaftaran tanah, pemerintah mengeluarkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Fokus penelitian ini adalah (1.) Apakah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk memberikan Kepastian Hukum terhadap objek tanah tersebut dapat tercapai?; (2.) Apakah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk memberikan Perlindungan Hukum terhadap objek tanah tersebut dapat tercapai?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normative dilengkapi dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, mencakup doktrin hukum dan peraturan perundangan, untuk menopang tesis ini dilakukan penelitian kepustakaan, adapun penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang untuk mendapat fakta fenomena hukum yang bersifat empiris, dianalisa dengan metode kualitatif yang melahirkan kesimpulan deduktif, yang menyajikan hal-hal umum mengarah pada hal yang khusus.

Setelah dilakukan penelitian ini, penulis berkesimpulan bahwa; (1.) Dengan diterbitkannya sertifikat Hak atas Tanah terhadap objek tanah, maka sudah tercapainya Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum terhadap objek Tanah tersebut, namun tidak tercapai secara sepenuhnya, karna berdasarkan Pasal 32 ayat 2, Sertifikasi Hak atas tanah tersebut baru sudah tidak bisa digugat lagi setelah 5 (lima) tahun diterbitkan. (2.) Dengan adanya program PTSL sebagai upaya pemerintah melindungi hak-hak rakyat dari kekuatan lain yang mengancam hak-haknya, dan memberikan kewajiban terhadap pemegang hak tersebut.

Saran: Memberikan kekuatan penuh kepada Sertifikat sebagai tanda bukti Hak atas Tanah yang paling kuat, serta tidak dapat diganggu gugat kembali mengenai pelaksanaannya, paling tidak dengan mengurangi jangka waktu kepada pihak lain yang merasa haknya terancam untuk mengajukan keberatan atau gugatan kepada Sertifikat tersebut.

Kata Kunci: *Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum dan Pendaftaran*

ABSTRACT
LEGAL CERTAINTY AND LEGAL PROTECTION OF LAND RIGHTS
AGAINST COMPLETE SYSTEMATIC LAND REGISTRATION
PROGRAM (PTSL)
Case Study At Tangerang Land Affair Office

The government through the Ministry of Agrarian affairs and Spatial Planning has the aim to provide Legal Certainty and Legal Protection to people who have land rights, by registering land to the community, in order to accelerate land registration, the government issued a complete Systematic Land Registration (PTSL) program.

The focus of this research is (1.) Can the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program to provide Legal Certainty to the land object be achieved?; (2.) Can the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program to provide Legal Protection against such land objects be achieved?

The method used in this study is normative law research equipped with secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials, including legal doctrines and laws and regulations, to support this thesis conducted literature research, as for research in the Tangerang District Land Office to get the facts of empirical legal phenomena, analyzed by qualitative methods that give birth to deductive conclusions, which presents general things leading to special things.

After this study, the authors concluded that; (1.) With the issuance of a certificate of Land Rights to land objects, the legal certainty and legal protection of the land object has been achieved, but not fully achieved, because based on Article 32 paragraph 2, sertifikasi rights to the land can no longer be sued after 5 (five) years of publication. (2.) With the PTSL program as an effort by the government to protect the rights of the people from other forces that threaten their rights, and provide obligations to the rights holders.

Suggestion from this research should be give full power to the Certificate as a proof of the most powerful Right to Land, and can not be contested again regarding its implementation, at least by reducing the period of time to other parties who feel the right is threatened to file objections or lawsuits to the Certificate.

Keywords: *Legal Certainty, Legal Protection and Land Registration*